

REPRODUKSI MULTIKULTURALISME DI TENGAH PLURALITAS MASYARAKAT BATAK: KEKHASAN PADA MASYARAKAT PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA

Dandung Budi Yuwono

LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dandungyuwono@yahoo.com

Artikel diterima 1 Maret 2018, diseleksi 2 April 2018, dan disetujui 22 Juni 2018

Abstract

Being granted of various religions and ethnicity, the people of Pematang Siantar could live harmoniously and free of religious-ethnic conflicts. The source of this paper is gained from a research applying anthropological-qualitative methods. The objective is to understand concept and thought, as well as to look at and observe the spirit of multiculturalism developed by the people of Pematang Siantar in maintaining their harmony. The data collection applies techniques of observation and deep interview, whereas the data is analysed interpretively by applying techniques of triangular analysis together with emic and etic perspectives. The result demonstrates that the harmony within the pluralistic society of Pematang Siantar could be maintained for within the people life, there have been developed collective awareness of plurality. Nevertheless, the society keep developing critical attitudes through the movement of multiculturalism that has been socially reproduced by applying internal perspective, namely the development of tolerant habit, the conservation of kinship system and tradition, the rejection of primordialism, and the application of the politic of multiculturalism.

Keywords: reproduction, multiculturalism, plurality, Batak society

Abstrak

Masyarakat Pematang Siantar dengan beragam agama dan etnisnya dapat hidup berdampingan secara harmonis, terbebas dari konflik agama-etnis. Sumber tulisan ini diperoleh dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif antropologis, bertujuan untuk memahami konsep pemikiran, melihat dan mengetahui semangat multikulturalisme yang dikembangkan masyarakat Pematang Siantar dalam mempertahankan harmonisasi. Pengumpulan datanya menggunakan teknik pengamatan dan wawancara mendalam, sementara analisis data dilakukan secara interpretatif, menggunakan teknik analisis triangulasi dengan memperhatikan perspektif emik dan etik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi di tengah pluralitas masyarakat Pematang Siantar dapat dipertahankan karena di dalam kehidupan masyarakat telah terbangun kesadaran kolektif tentang keragaman. Meskipun demikian, masyarakat tetap mengembangkan sikap kritis melalui gerakan multikulturalisme yang direproduksi secara sosial dengan menggunakan perspektif internal, yakni pengembangan sikap toleransi, pelestarian sistem kekerabatan dan tradisi, menolak primordialisme dan penerapan politik multikulturalisme.

Kata Kunci: reproduksi, multikulturalisme, pluralitas, masyarakat Batak

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang beraneka suku, etnis, budaya, dan bahasa yang tersebar di penjuru kepulauan bahkan terdapatnya berbagai agama dengan penghayatan dan pengamalan keagamaan yang unik dibanding bangsa lain, merupakan lanskap sosio-kultural yang menarik untuk dilihat. Sebagaimana Akil (1994) yang dikutip Yuwono (2017: 106), mengatakan bahwa keanekaragaman demikian di satu sisi, merupakan modal dasar yang dapat memperkaya dinamika keagamaan yang positif, tetapi di sisi lain, hal demikian justru dapat menjadi faktor kendala yang dapat mengancam kelangsungan masyarakat dalam beragama dan berbangsa. Artinya, meski keragaman budaya dan agama merupakan realitas sosial yang niscaya di Indonesia, tetapi keragaman tidak serta merta membawa implikasi positif. Masih terjadi di antara masyarakat yang justru karena adanya perbedaan latar belakang budaya, etnis, dan agama menjadikan hambatan dalam mereka bekerjasama merespons problem kemanusiaan yang dihadapinya, seperti, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan hingga isu lingkungan hidup.

Di bagian lain, di tengah kehidupan masyarakat akar rumput (*grass root*), kerja sama lintas kultur dan iman masih merupakan barang langka dalam merespons isu-isu kemanusiaan dan lingkungan hidup. Kerjasama yang ada masih bersifat elitis, hanya dilakukan oleh kalangan elite agama dan intelektual lintas iman, dan gerakannya pun masih bersifat elitis, seperti seminar yang dilakukan oleh kalangan akademisi. Bahkan mereka hanya berputar di lingkungannya tanpa pernah melakukan gerakan internalisasi dan penyadaran

menyentuh masyarakat luas. Tak heran jika kesadaran multikulturalisme yang terbangun adalah multikulturalisme yang bersifat permukaan (*artificial multiculturalism*), atau lebih tepat disebut dengan multikulturalisme borjuis, yang hanya menyentuh kelompok 'elite borjuis'. Ini sejalan sebagaimana dikatakan Ridwan (2001), bahwa dalam komunitas Islam, multikulturalisme baru tersentuh oleh mereka yang telah mapan (menengah ke atas) baik secara ekonomi, politik maupun pendidikan. Karenanya semangat multikulturalisme belum bisa 'membumi' hingga masyarakat bawah.

Dalam suasana sosial dan akademis demikian, menjadi menarik merenungkan kembali semangat multikulturalisme di tengah masyarakat di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Meski penduduknya plural dari segi etnis ataupun agama, namun harmonisasi hubungan antar warga dapat terjalin dengan baik, dan terbebas dari konflik etnis dan agama. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat Kota Pematang Siantar membangun kesadaran keberagaman (pluralitas dan multikultur), budaya, dan agama di wilayahnya? Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan relevan sebagai rumusan masalah: (1) Bagaimana konsep atau strategi masyarakat Kota Pematang Siantar dalam membudayakan wawasan multikulturalisme? (2) Siapa tokoh yang berperan, kemudian kembali mempertanyakan melalui cara dan dalam bentuk kegiatan apa multikulturalisme dikembangkan di wilayah Pematang Siantar?

Tujuan penelitian ini, adalah untuk memahami konsep pemikiran masyarakat Pematang Siantar yang pada akhirnya akan mengetahui cara yang

ditempuh dalam rangka membumikan pemahaman multikultural di wilayah ini sebagai representasi gerakan dari bawah (*bottom-up*) yang menyentuh masyarakat luas, dapat berlangsung dalam jangka panjang, dan mampu menahan benturan konflik antar etnis dan agama.

Penelitian bertemakan multikulturalisme telah banyak dilakukan para peneliti sebelumnya, di antaranya penelitian Silitonga (2016) yang mencoba melakukan analisis pada struktur pemerintahan Kota Pematang Siantar di mana seorang kepala daerah sangat berpengaruh dalam penentuan struktur pemerintahan eksekutif. Penelitian Daulay (2016) melihat bahwa kontribusi terbesar terciptanya harmonisasi kehidupan masyarakat, terbebas dari konflik sosial di Pematang Siantar karena adanya *local wisdom* dan terjalinnya relasi antarorganisasi agama ataupun suku yang tidak sekadar di internal kelompoknya melainkan meluas hingga ke eksternal kelompok masing-masing melalui berbagai kegiatan. Penelitian Yuwono (2008), melihat gerakan multikultural di wilayah Wayame sehingga terbebas dari persoalan konflik Ambon. Masyarakat Wayame sudah sejak awal mencoba membangun kesadaran kolektif untuk tidak terlibat dalam konflik. Salah satu basis kesadaran kolektif tersebut adalah ekonomi, dan tidak rusaknya sistem *pela dan gandong* di Wayame, merupakan fenomena dialektis. Sementara penelitian Salam (1977) yang berjudul: "*Kudus Purbakala dalam Perjuangan Islam*", mencoba mengungkap artefak sebagai simbol fisik multikulturalisme yang terus direproduksi secara sosial. Dari sejumlah penelitian tersebut tampaknya hanya dilakukan secara parsial, artinya sekadar menggambarkan atau mengungkap sosok figur tokoh (*role model*) dan gerakan

multikulturalisme yang dilakukan secara terpisah dengan menggunakan semiotika dan hermeunetik.

Membedakan penelitian yang telah ada, penelitian ini akan mengungkap konsep pemikiran, cara-cara atau bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat Pematang Siantar dalam rangka membumikan semangat multikulturalisme agar terus dapat mempertahankan harmonisasi kehidupan. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menginspirasi serta direduksi dalam membuat model penyelesaian konflik antar etnis dan agama, atau yang diperlukan dalam upaya pengelolaan konflik antar etnis dan agama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan.

Keberadaan kelompok etnis dan kelompok keagamaan di Pematang Siantar tidak dalam batas-batas fisik (*physical boundaries*) yang tegas. Satu sama lain telah bercampur dalam satu ruang fisik yang antar mereka telah membagi wilayah secara saling bersinggungan bahkan berhimpitan. Proses interaksi kelompok etnis dan kelompok keagamaan dalam suatu *setting* sosial di wilayah ini, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan. *Pertama*, artikulasi keberadaan suatu kelompok etnis dan kelompok keagamaan di mana kehadiran setiap warga kelompok etnis dan kelompok keagamaan mengalami proses penegasan baik oleh pemeluk kelompok etnis dan kelompok keagamaan yang bersangkutan maupun oleh pemeluk kelompok etnis dan kelompok keagamaan lain yang ada di lingkungan masyarakat di Kota Pematang Siantar. Sebagaimana dalam hubungan antar etnis yang dijelaskan Appadurai (1994), bahwa ekspresi etnisitas bagi suatu etnis merupakan keberlanjutan masa

lalu yang merupakan bentuk politik emansipatoris dan penegasan autentisitas etnis. Politik emansipatoris merupakan suatu strategi untuk menghadirkan kesukubangsaannya dalam suatu *setting* sosial yang cenderung menghilangkan batas-batas etnis (Abdullah, 1999; Soros, 2000). Artinya, proses penegasan suatu identitas etnis tertentu dapat pula dilakukan oleh lingkungannya atau oleh kelompok lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam serangkaian proses sosial semacam ini, identitas bukan lagi merupakan sesuatu yang dibawa secara biologis, tetapi merupakan suatu konstruksi sosial yang keberadaannya berlangsung karena pemaknaan dalam serangkaian interaksi yang terjadi antara kelompok etnis dengan kelompok etnis lain.

Kedua, keberadaan ruang publik di mana perbedaan antarkelompok etnis dan keagamaan mendapatkan pengikisan dalam proses pembauran di suatu ruang publik. Dalam suatu ruang publik tertentu setiap orang belajar berkomunikasi dengan cara lebih cepat dapat diterima secara umum di satu sisi dan setiap kelompok pun di lain sisi belajar untuk menerima perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kelompok lain (Green, 1995). Ruang-ruang publik yang terbentuk pada dasarnya memiliki potensi pengikat yang sangat kuat di dalam pembentukan solidaritas baru yang lintas-etnis, lintas-agama, dan lintas-budaya (Starr, 1999; Kappus, 1999). Dalam interaksi semacam ini juga selain akan menghilangkan perbedaan-perbedaan atau terjadinya penerimaan terhadap ciri-ciri yang berbeda, juga akan menghasilkan pengayaan-pengayaan dalam berbagai bentuknya. Ciri-ciri yang berbeda dapat saja kemudian tidak dinilai sebagai faktor pembeda yang memisahkan

satu kelompok dengan kelompok lain tetapi dianggap sebagai variasi yang memperkaya lingkungan sosial mereka. Pengayaan-pengayaan akan terjadi pada saat penyerapan bentuk-bentuk ekspresi satu kelompok diadopsi oleh kelompok lain yang seringkali dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari ekspresi seseorang atau sekelompok orang (Eller, 1999). Proses semacam ini memiliki potensi di dalam pembauran antarkelompok etnis dan agama dalam lingkungan sosial tertentu. Ruang-ruang publik yang tersedia dalam berbagai bentuk memungkinkan komunikasi budaya berlangsung dengan baik.

Ketiga, simbol-simbol komunikasi antarkelompok etnis dan keagamaan yang merupakan kunci dalam proses pembauran. Manusia sebagai makhluk simbolis cenderung hidup dalam proses menciptakan simbol dan membaca atau memaknai simbol-simbol dalam proses interaksi. Simbol tentu saja mengalami suatu proses konstruksi yang berlangsung secara dinamis (Berger dan Luckmann, 1979; Cheater, 1999). Walaupun berbagai simbol telah tersedia dalam kehidupannya, proses pemaknaan dari simbol tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga suatu simbol dapat dikonsepsikan secara berbeda berdasarkan pada generasi berbeda. Makna-makna simbolis ini akan diberikan berdasarkan interpretasi sehingga sangat mungkin bahwa interpretasi tersebut berbeda antara satu generasi dengan generasi lain.

Ketiga aspek di atas merupakan wilayah cakupan yang penting dalam menjelaskan proses pembauran antarkelompok etnis dan keagamaan yang terjadi di wilayah Kota Pematang Siantar. Untuk ini, ciri-ciri lingkungan

di mana sejumlah warga kelompok etnis dan kelompok keagamaan berada dalam dan merupakan konteks, sangat menentukan bagaimana pola komunikasi berlangsung, yang dalam hal ini konteks sosial memberi kerangka dan membentuk karakter kelompok dan hubungan antarkelompok etnis dan kelompok keagamaan. Di lain pihak, dalam kasus kebudayaan dominan, lingkungan sosial memberi pengaruh yang besar di dalam membangun suatu komunikasi budaya dalam proses interaksi antarkelompok etnis dan keagamaan. Sejalan dengan ini, setiap lingkungan sosial memiliki latar belakang historis yang penting untuk dikaji dan memiliki realitas obyektif (*Berger dan Luckmann, 1979*) yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki daya paksa terhadap setiap anggota kelompok-kelompok etnis dan keagamaan dalam proses integrasi sosial.

Suatu fakta penting yang sering diingkari adalah keberhasilan setiap etnis hidup berdampingan dengan etnis lain. Dalam lingkungan yang multietnis yang memiliki ekspresi etnisitas yang berbeda-beda dengan asal usul yang berbeda pasti memiliki suatu simbol universal yang dapat di kode atau dibaca, paling tidak, oleh hampir semua etnis yang dengan simbol inilah mereka dapat memelihara sistem sosial yang terintegrasi. Simbol-simbol komunikasi yang dibangun bersama-sama, tentu saja ditanamkan dan dipelihara keberadaannya dalam suatu ruang publik (*public space*) yang keberadaannya juga dinegosiasikan dalam serangkaian interaksi. Dalam interaksi sosial antaretnis tersebut simbol-simbol dapat dipertukarkan yang menyebabkan terjadinya penyerapan dan pengayaan ekspresi kebudayaan suatu etnis dalam lingkungan yang pluralistik. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan tidak

selalu menimbulkan konflik antaretnis dan bahkan persinggungan atau perhimpitan antaretnis ini telah memperkaya masing-masing dengan penguasaan bahasa, pengembangan kepribadian, pengayaan wawasan, pendewasaan, keterbukaan, dan berbagai praktik sosial yang lebih akomodatif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif antropologis, yang metode pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan, dan wawancara mendalam, yang dianalisis secara interpretif (menafsirkan makna yang terkandung dalam struktur dan fungsi simbol yang terdatakan). Teknik pengamatan dilakukan terhadap subyek penelitian baik di tingkat individual maupun di tingkat kelompok masyarakat untuk mengetahui keberadaan etika lokal dan bagaimana mereka mereproduksi hubungan antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya di masa lalu dan kekinian. Pengamatan dilanjutkan dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) pada tingkat individu maupun kelompok masyarakat untuk mengetahui gambaran sosial budaya yang dijadikan *setting* wilayah penelitian. Semua data hasil wawancara dan pengamatan (observasi) dicatat secara cermat, serinci mungkin dan dikumpulkan sehingga menjadi suatu catatan lapangan atau *fieldnotes* (*Sanjek 1990; Fetterman 1989*). Semua data kemudian dianalisis untuk menghasilkan etnografi (idea, aktivitas sosial dan artefak unsur agama, ilmu pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, kesenian yang dilandasi *world view*) dengan memperhatikan perspektif emik dan etik.

PEMBAHASAN

Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Kota Pematang Siantar

Kota Pematang Siantar (sering disingkat Siantar) adalah kota terbesar kedua setelah Medan di Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas wilayah 79,97 km², berada di wilayah teritorial Kabupaten Simalungun yang berpenduduk asli sub-suku Batak Simalungun.¹ Penduduk yang berdiam di Kota Pematang Siantar berjumlah 249.505 jiwa, terdiri atas laki-laki sejumlah 121.684 jiwa dan perempuan 127.821 jiwa (BPS Pematang Siantar, 2017) bukanlah *ansich* berasal dari suku Batak Simalungun, tetapi juga Batak Toba, Jawa, sebagian kecil Tionghoa, Batak Karo serta suku lainnya, dengan mayoritas beragama Kristen mencapai 51,25% (Protestan 46,54% dan Katholik 4,71%), sementara yang beragama Islam mencapai 43,90%, Buddha 4,36%, Konghuchu 0,01%, dan Hindu 0,11%.

Dalam bingkai keragaman demikian, terdapatnya tempat ibadah berbagai agama secara berdampingan, seperti Masjid Bakti dan Gereja Kristen Protestan Indonesia di Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Martoba, adanya Vihara Avalokitesvara dengan patung Dewi Kwan Im setinggi 22,8 meter yang berdiri kokoh menunjukkan bahwa Kota Pematang Siantar adalah sebuah kota berwajah tenang, tanpa pernah terjadi gesekan sosial antar warga. Slogan berbahasa Suku Batak Simalungun, "*Sapangambe Manoktok Hitei*" atau 'bergotong-royong demi tujuan mulia', yang terpampang di ruang-

ruang publik mempertegas terdapatnya kesadaran masyarakat bahwa mereka terdiri dari berbagai suku, adat, agama, dan budaya, sekaligus menyimbolkan agar masyarakat satu sama lain harus terus bekerjasama, bergotong royong, karena dengan bercerai berai maka tidak ada kekuatan dalam membangun kemajuan dan peradaban.

Realitasnya, masyarakat Kota Pematang Siantar yang plural, beragam etnis, ras, budaya, gender, strata sosial, agama, perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi dapat saling berinteraksi dan hidup secara harmonis. Dalam konteks pembauran, masyarakat satu sama lain dapat bekerjasama dalam membangun dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah kehidupan mereka. Para pedagang di pasar berbeda etnis pun dapat melakukan aktivitas secara berdampingan tanpa adanya diskriminasi kelompok etnis dan agama. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajemukan dalam kehidupan masyarakat Pematang Siantar tidak berdampak negatif, bahkan dengan perbedaan justru meningkatkan toleransi yang memberi warna tersendiri bagi Kota Pematang Siantar. Terwujudnya kondisi ini sangat erat dengan prinsip dasar multikultural yang dipegang teguh masyarakat, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip dasar multikultural masyarakat Suku Batak Simalungun yang mengakui dan menghargai keberagaman kelompok masyarakat pada tataran praktis mampu merubah perilaku masyarakat di Kota Pematang Siantar yang multikultur, tidak berlandaskan dan tidak mengisyaratkan pada pemilikan budaya tertentu tetapi berlandaskan pada kesadaran menghargai dan menghormati.

1 Suku Batak di Sumatera Utara terdiri dari berbagai sub-suku, yakni: Batak Alas, Batak Karo, Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Dairi, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing, Batak Tapan Nauli, dan Batak Pesisir di Kabupaten Taapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

Terbangunnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap keberagaman merupakan salah satu faktor yang mendukung terwujudnya harmonisasi masyarakat di Kota Pematang Siantar, terbebas dari persoalan konflik etnis dan agama.

Dengan cara yang sama, kenyataan hidup sehari-hari masyarakat Pematang Siantar telah diobjektivasi, telah dibentuk oleh suatu tatanan obyek-obyek yang sudah diberi nama sebagai obyek sejak sebelum masyarakat Pematang Siantar hadir (lihat Berger dan Luckmann, 1990), karenanya bentuk perilaku multikulturalisme akhirnya menjadi fakta sosial. Ia tidak lagi sekadar terletak di dalam masyarakat secara individu tetapi senantiasa menekan individu masyarakat Pematang Siantar untuk berperilaku sebagaimana adanya realitas sosial yakni masyarakat yang multikulturalis (lihat Abdullah & Vander Leeden, 1986). Inilah konsekuensi keberadaan masyarakat Pematang Siantar yang kehidupannya penuh tatanan bahkan tekanan atas konstruksi multikulturalisme. Dengan sendirinya secara individu, masyarakat Pematang Siantar akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku mereka.

Seiring dengan wilayah Kota Pematang Siantar yang terus mengalami perkembangan yang diikuti dengan lonjakan jumlah penduduk mengandung konsekuensi sosial tidak sederhana yang mensyaratkan pengelolaan konflik dalam mempertahankan stabilitas kehidupan masyarakat. Menyikapi ini, paratokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan elite politik bersama masyarakat secara sinergis terus mengembangkan sikap kritis, sebagai bentuk respons sekaligus penghormatan atas segala perbedaan dan

keragaman. Pengembangan sikap kritis atau lebih merupakan gerakan kultural dengan menggunakan 'perspektif internal', yakni suatu upaya yang dilakukan sesuai kehendak, sesuai cara-cara, bertumpu pada potensi yang dimiliki masyarakat tanpa melibatkan pihak di luar mereka, mengkristal dalam praktik multikultural, yang direproduksi secara sosial di tengah kehidupan masyarakat Kota Pematang Siantar.

Pengembangan Sikap Toleransi

Menghadapi segala perbedaan nilai dan norma, agama, kebudayaan, ras, suku bangsa, serta adat istiadat, masyarakat Pematang Siantar satu sama lain saling mengembangkan sikap saling pengertian. Adanya sikap pengertian menjadikan kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan budaya dapat berlangsung kondusif. Di lain pihak, menyadari dan belajar dari berbagai pengalaman bahwa faktor agama berpotensi menjadi pemicu terjadinya konflik, itu sebabnya masyarakat Pematang Siantar melakukan antisipasi (preventif) terhadap kemunculan gerakan-gerakan berbasis agama yang bertujuan menghancurkan agama lain menciptakan disintegrasi. Mengantisipasi terjadinya rivalitas, penindasan, kebencian, dan sikap saling menghancurkan maka para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan komunitas agama, atau lembaga-lembaga agama bersama masyarakat di wilayah ini terus melakukan dan mengembangkan forum-forum dialog yang dilakukan secara berkala. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MUI, Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG), Walubi, Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), serta Perwakilan Pimpinan Agama di Kota Pematang Siantar pun

gencar melakukan sosialisasi pemahaman multikultural tentang pentingnya membangun harmonisasi kehidupan. Sebagaimana dikatakan Ali Lubis, Ketua MUI Kota Pematang Siantar:

“Realitas masyarakat yang plural dan multikultural adalah suatu keniscayaan. Ini sebagaimana ditegaskan dalam penciptaan manusia atas laki-laki maupun perempuan, berkelompok dan bersuku-suku, tidak lain agar di antara mereka dapat saling mengenal (*lita'arafu*), dapat saling kerja sama untuk memajukan alam dan lingkungannya sehingga bermanfaat bagi manusia dan lebih beradab” (Wawancara, 27/09/2017).

Artinya, fenomena multikultural sudah menjadi bagian dari imperatif peradaban manusia melingkupi pluralitas ras, etnis, jender, kelas, dan agama hingga pilihan gaya hidup. Prinsip ini setidaknya tertumpu pada dua keyakinan; *Pertama*, secara sosial, semua kelompok budaya dapat direpresentasikan dan hidup berdampingan bersama. *Kedua*, diskriminasi dan rasisme dapat direduksi melalui penetapan citra positif keragaman etnis dan wawasan terhadap budaya-budaya lain.

Meski lembaga keagamaan efektif mampu berperan sebagai lembaga peredam konflik, namun tanpa dukungan masyarakat hampir dapat dipastikan integrasi dan harmonisasi sosial di Kota Pematang Siantar tidak mungkin dapat terwujud. Dimaksudkan, keberhasilan gerakan lembaga keagamaan dalam menciptakan harmonisasi di wilayah ini tidak semata atas keberfungsian forum-forum dialog antarumat beragama, tetapi juga karena daya dukung masyarakat yang memiliki karakter: sangat

menghormati dan patuh kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang diposisikan sebagai figur panutan sekaligus pengayom. Apa yang menjadi keputusan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat menjadi cara berpikir dan bertindak bagi sebagian besar masyarakat di Pematang Siantar.

Di luar itu, bahwa tipikalitas masyarakat Pematang Siantar, baik masyarakat Kristen ataupun muslim tergolong masyarakat yang taat beribadah. Ajaran-ajaran agama, norma dan aturan adat sangat dipegang teguh dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang beragama Kristen ataupun muslim sangat patuh dan memperhatikan ajaran agamanya dalam menjaga perdamaian di wilayahnya. Ajaran ‘kasih’ yang ada dalam setiap agama, yang mengajarkan tentang hidup di dalam perdamaian sangat berpengaruh dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Sekalipun manusia pada umumnya memiliki sifat yang berbeda-beda, namun jika mereka menerapkan ajaran kasih dalam kehidupannya sehari-hari maka akan tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, perbedaan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk memulai atau melakukan sebuah konflik, selain hanya untuk saling memahami. Dipraktikkannya ajaran kasih, tak heran jika masyarakat Pematang Siantar begitu menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, yang dibuktikan dengan tidak adanya catatan sejarah konflik antarumat beragama di wilayah ini.

Sebagaimana teori pluralisme, adalah realitas bahwa dalam suatu kehidupan bersama manusia terdapat keberagaman suku, ras, budaya, dan agama. Keragaman agama dapat terjadi karena faktor lingkungan tempat manusia

itu hidup juga tidak sama (Titaley, 2013: 169). Selanjutnya, pluralisme adalah suatu sikap mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak, atau banyak itu (Smartana, 2005: 218). Tetapi bukan berarti bahwa pluralisme sekadar sesuatu yang bersifat *stagnan*, berhenti dan tidak dikembangkan. Pluralisme mengindikasikan adanya pertemuan dan keterlibatan aktif di antara penganut agama-agama yang berlainan, bahkan melampaui toleransi. Toleransi tidak sekadar mengharuskan orang untuk saling memahami, tetapi justru sebaliknya. Pluralisme justru mengharuskan untuk kita saling berkomunikasi secara rasional agar saling mengetahui satu sama lain dan aktif melibatkan diri dalam kehidupan bersama (Komisi Teologi PGI, 2012: 113-114). Pluralisme akan benar-benar berfungsi jika terdapat ruang bersama di mana masing-masing pihak terlibat dalam pembentukan dan pengembangan komunitas bersama yang lebih luas, mencakup dan mewadahi semuanya tanpa menelantarkan kekayaan tradisi mereka masing-masing (Effendi, 2011: 5).

Hal sebagaimana di atas, telah dipraktikkan di tengah kehidupan masyarakat Pematang Siantar, bahkan perjumpaan yang terjadi antara suku, budaya, dan agama yang berbeda di wilayah ini sudah lebih, tidak sekadar toleransi biasa. Sebagaimana disampaikan oleh Aulia Hasibuan, seorang pedagang di Pasar Horas, Pematang Siantar:

“Menyangkut soal peribadatan, tak jarang mereka yang beragama Kristen mengingatkan untuk sholat kepada saudaranya yang muslim jika sudah tiba waktu sholat. Di hari besar Idul Fitri, masyarakat

mengadakan *Halal bi Halal*, dan masyarakat muslim mengundang masyarakat non-muslim untuk menghadiri dan memeriahkannya, demikian sebaliknya ketika masyarakat Kristen merayakan Natal, mereka juga mengundang masyarakat muslim untuk hadir di rumah mereka” (Wawancara, 25/09/2017).

Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat demikian sudah lebih dari sikap menghargai, mengakui, dan menghormati atau masyarakat sekadar saling bertatap muka, tetapi sudah menunjukkan sikap saling peduli terhadap sesama, melibatkan diri secara aktif terlebih jika di antara mereka ada yang sedang mengalami kesusahan ataupun kesenangan, dan dapat saling berkomunikasi dengan baik di lingkungannya.

Pelestarian Sistem Keekerabatan dan Tradisi

Terciptanya perdamaian di Pematang Siantar juga tidak lepas dari latarbelakang sistem keekerabatan *Tolu Sahundulan* yang hingga kini masih berlangsung di wilayah ini. *Tolu Sahundulan* yang secara bahasa dapat diterjemahkan merupakan *Tiga Kharismatik Duduk Bersama* dalam jejaring kekeluargaan, meliputi saudara semarga, kerabat dari pihak mertua yang mengizinkan berikah anak wanitanya dinikahi, dan kerabat dari pihak laki-laki yang menikahi anak atau saudara perempuan kita. *Tolu Sahundulan* merupakan sistem keekerabatan yang mengajarkan saling menghargai, membantu, partisipasi, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan mereka, bahwa masyarakat yang berdiam di Pematang Siantar adalah keluarga, yang memiliki hubungan darah karena adanya pernikahan. Pernikahan dimaksud adalah pernikahan antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang. Banyak di antara mereka, setelah menikah dan memiliki keturunan, mereka tetap menetap di wilayah ini, sehingga terciptalah suatu keluarga besar, sebuah masyarakat yang satu sama lain mempunyai hubungan darah. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Bapak Sinaga, tokoh masyarakat (Wawancara, 27 September 2017).

Melalui sistem kekerabatan, masyarakat Pematang Siantar dapat bersatu, tanpa memandang kelas sosial, baik yang kecil dan yang jauh sekalipun, sehingga kemajemukan masyarakat di wilayah ini dapat terjaga dan terpelihara, tanpa pernah terjadi konflik dan gesekan di antara mereka. Artinya, kenyataannya adat *Tolu Sahandulan* dapat menjamin sebuah keadilan, menyebabkan masyarakat dapat hidup dalam suasana damai, aman, tentram, dan nyaman. Sistem kekerabatan ini direproduksi, diwariskan dan terus dipelihara agar perdamaian dalam kemajemukan tetap dapat dipertahankan.

Tolu Sahandulan tidak jauh berbeda dengan *Dalihan Na Tolu* bagi masyarakat suku Batak Toba dan *Rakut Sitelu* bagi masyarakat suku Batak Karo, meski antara ketiganya memiliki perbedaan. Bagi masyarakat suku Batak Simalungun, *Tolu Sahandulan* disatukan dengan falsafah *Habonaron Do Bona*, yakni falsafah yang memiliki arti "kebenaran sebagai pangkal" atau dasar segala sesuatu yang dikerjakan masyarakat Simalungun. Artinya, setiap aktivitas haruslah didasari atas kebenaran agar

segala suatu kegiatan dapat berlangsung dengan baik sesuai adat. Praktis, sistem ini dapat melekatkan dan mempererat hubungan antar masyarakat di wilayah Pematang Siantar, yang tidak memandang status sosial masyarakat, berlangsung umum dan dapat mereduksi semua penganut agama, atau tidak memandang perbedaan agama. Yang menarik, realitasnya, praktik penerapan falsafah *Habonaron Do Bonatidak* hanya terbatas bagi etnis Simalungun saja, tetapi juga masyarakat pendatang di Pematang Siantar. Tak heran, melekatnya falsafah ini mampu menghantarkan masyarakat Pematang Siantar sebagai wilayah yang rukun, tenang, dan damai.

Di bagian lain, dipahami bahwa konflik merupakan suatu gejala sosial yang wajar sebagai akibat interaksi sosial yang dilakukan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat akibat perbedaan-perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, seperti kepentingan, pendapat, dan lainnya. Konflik memang terkadang sulit dihindari, terutama apabila perasaan kita selalu diliputi dengan prasangka, sentimen komunitas, dan emosional pribadi. Agar konflik yang terjadi di masyarakat tidak berakhir dengan kekerasan yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban jiwa, diperlukan cara-cara akomodatif dalam menyelesaikan konflik agar tetap dapat mempertahankan integrasi sosial dalam masyarakat.

Masyarakat Pematang Siantar yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan tidak berarti luput dari persoalan konflik antar pribadi. Meski berskala kecil masih saja dijumpai konflik antar individu, seperti kasus perkelahian antar anak muda, sengketa tanah, dan sebagainya.

Dalam rangka penyelesaian konflik, cara-cara musyawarah menjadi hal yang terus dikembangkan di wilayah Pematang Siantar. Bahkan, ketika konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antar keluarga atau secara kekeluargaan, maka akan dilakukan musyawarah hingga tingkat perangkat desa. Cara-cara ini yang selama ini dilakukan masyarakat Pematang Siantar dalam meredam atau mengurangi konflik agar tidak meluas.

Menolak Sikap Primordialisme, Merajut Politik Multikulturalisme

Kekerabatan pada masyarakat Batak memiliki dua jenis, yaitu kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan (genealogis) dan secara sosiologis. Semua suku bangsa Batak memiliki marga, inilah yang disebut dengan kekerabatan berdasarkan genealogis. Sementara kekerabatan berdasarkan sosiologis terbentuk melalui perkawinan. Sistem kekerabatan muncul di tengah-tengah masyarakat karena menyangkut hukum antara satu sama lain dalam pergaulan hidup.

Sekalipun Kota Pematang Siantar masuk dalam teritorial Kabupaten Simalungun yang berpenduduk asli sub-suku Batak Simalungun, namun mayoritas penduduk Kota Pematang Siantar berasal dari suku Batak Toba, tak heran jika masyarakat Kota Pematang Siantar sangat kental dengan budaya dan adat etnis ini. Dalam banyak hal, terutama dalam kegiatan sosial, adat Batak Toba sering dikaitkan dengan norma-norma sosial, karenanya hukum adat Batak Toba tetap dijunjung tinggi dan dipegang teguh dan memiliki pengaruh cukup kuat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat di Pematang Siantar.

Sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba menempatkan posisi seseorang sejak dilahirkan hingga meninggal dalam tiga posisi yang disebut *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* dapat diartikan sebagai tumpuan tiga serangkai², merupakan suatu sistem sosial di tanah Batak yang menempatkan posisi masing-masing orang Batak pada kedudukan tertentu di mana setiap kedudukan ini mempunyai fungsi dan tanggung jawab tersendiri (*Simanjuntak, 2006: 100*). *Dalihan Na Tolu* bukan kasta, karena setiap orang Batak tidak memandang posisi seseorang berdasarkan pangkat, harta atau status seseorang. Umumnya, *Dalihan Na Tolu* sangat dipahami dengan baik oleh masyarakat mayoritas bahkan minoritas di Kota Pematang Siantar. Dalam beberapa peristiwa, baik itu pertemuan jual-beli di pasar, saling tegur-sapa, bahkan ketika etnis lain menghadiri upacara adat etnis Batak, masyarakat di luar etnis Batak di Kota Pematang Siantar begitu paham dan mampu memaknai tiga dasar norma tersebut, dipraktikkan

² Dalihan Na Tolu dimaksudkan: (a) *Hulahula* atau *Tondong* yaitu kelompok orang yang posisinya “diatas”. Dalam hal ini adalah keluarga marga pihak istri, sehingga disebut “*somba marhula-hula*” yang berarti harus hormat kepada keluarga pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan; (b) *Dongan Tubu* atau *Sanina*, yaitu kelompok orang yang posisinya “sejajar”. Dalam hal ini adalah teman atau saudara semarga, sehingga disebut “*manat mardongan tubu*” yang artinya menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan; dan (c) *Boru*, yaitu kelompok orang yang posisinya “dibawah”. Dalam hal ini saudara perempuan kita dan pihak marga suaminya, sehingga disebut “*elek marboru*” yang artinya selalu saling mengasihi agar mendapat berkah dalam kehidupan. *Dalihan Na Tolu* masyarakat suku bangsa Batak Toba ini, oleh masyarakat suku bangsa Batak Simalungun dikembangkan dengan menambahkan *Tondong ni Tondong* (ipar kandung, menantu, kemenakan) dan *Boru ni Boru* atau *Anak Boru Mintori* (iparnya ipar), yang kemudian dikenal dengan *Tolu Sahundulan* dilengkapi dengan *Lima Saodaron*.

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah ini.

Meski demikian, melalui kesadarannya, masyarakat Pematang Siantar tidak ingin terjebak dalam sikap primordialisme kesukuan, tidak fanatis (*ethnosentrisme*) dalam kehidupan bermasyarakat. Sekali pun sikap primordialisme jika dilihat secara positif dapat memperkuat posisi dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi hal yang seringkali muncul bahwa sikap primordialisme kemudian akan menjadi penyebab terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Sikap primordialisme kesukuan justru akan memunculkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat Pematang Siantar yang multikultural. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ali Lubis, Ketua MUI sekaligus tokoh masyarakat di Kota Pematang Siantar (Wawancara, 26 September 2017).

Dalam konteks politik praktis, masyarakat telah melakukan upaya pengembangan politik multikulturalisme sebagaimana tampak dalam struktur pemerintahan eksekutif di Kota Pematang Siantar. Sebagai kota yang memiliki keberagaman etnis dan agama, yang *notabene* etnis Batak Toba dan pemeluk agama Kristen Protestan merupakan penduduk mayoritas, namun tidak kemudian etnis Batak Toba dapat dan akan menguasai dalam kancah perpolitikan, mengingat selain suku Batak Toba, Kota Pematang Siantar juga dihuni oleh etnis lain yaitu Jawa, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Tionghoa, Minang, Batak Karo, Melayu, Nias, Aceh, Batak Pakpak, Batak Tapanuli Nauli Tapanuli Tengah, Batak Pesisir Kota Sibolga, dan lainnya. Memang komposisi penduduk tidak selamanya memberikan pengaruh terhadap politik multikulturalisme, tetapi

setidaknya dapat memberikan gambaran tentang keberagaman yang ada di wilayah ini.

Perkembangan politik di Kota Pematang Siantar sudah berlangsung cukup baik, dimana keterbedaan dalam berbagai etnis dan agama pada kenyataannya tidak menimbulkan diskriminasi dalam partisipasi politik. Meski tidak terpungkiri masih terdapat strategi elite politik yang menggunakan pendekatan etnis dan agama dalam mencapai kekuasaan. Artinya, dalam kasus ini praktik toleransi pada kenyataannya tidak memberikan pengaruh yang bermakna. Hal ini jelas terlihat dalam kasus Pemilihan Kepala Daerah maupun anggota DPRD di Kota Pematang Siantar, masih saja dijumpai ketimpangan dalam pemilihan anggota legislatif, di mana kandidat terpilih tidak dalam kondisi berimbang antara Kristen dan Islam, sebagaimana dikatakan Bapak Sinaga, tokoh masyarakat:

“Berlangsungnya politik multikulturalisme di Kota Pematang Siantar telah dibuktikan dengan pembagian pejabat pada masa kepemimpinan Hulman Sitorus pada tahun 2010-2015 yang terdiri dari berbagai etnis mulai dari pejabat Eselon IV sampai Eselon II, yakni 36 orang suku Batak Toba, 11 orang suku Batak Simalungun, 2 orang suku Batak Karo, 4 orang suku Batak Mandailing, 7 orang suku Jawa dan 1 suku Nias” (Wawancara, 27/09/2017).

Hal demikian memberikan penjelasan, sekalipun etnis mayoritas masih tetap mendominasi, namun masyarakat di luar etnis mayoritas sudah tampak dalam posisi jabatan

di pemerintahan eksekutif. Artinya, politik multikulturalisme bukan hanya sekadar melihat keanekaragaman dalam komposisi penduduk, tetapi lebih menyeluruh terhadap keanekaragaman sebagaimana tampak dalam struktur pemerintahan kota yang disambut baik bahkan masyarakat Pematang Siantar berharap dengan politik multikulturalisme dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di wilayahnya.

Fenomena demikian sesuai dengan pendapat Taylor, bahwa inti dari konsep parlemen multikultural adalah, setiap kelompok yang ada di Indonesia memiliki perwakilannya langsung di parlemen atau lembaga legislatif. Tugas mereka adalah menyalurkan suara masing-masing kelompok untuk menciptakan keputusan yang didasarkan atas kepentingan bersama. Namun kelompok-kelompok tersebut tidak hanya terbatas pada teritori, suku ataupun agama semata melainkan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan hidup yang unik serta partikular (*Wattimena, 2011: 20*).

Sekalipun demikian, di dalam praktik masih dijumpai ketidaksesuaian, atau tidak sesuai sebagaimana kriteria yang semestinya, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat minoritas, yang merasa seperti "dianaktirikan". Karenanya, belajar dari pengalaman selama ini, para tokoh masyarakat kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan, di antaranya pejabat yang dipromosikan menjadi pimpinan hendaknya berdasarkan atas prestasi kerja, pendidikan, pengalaman, loyalitas dan lain sebagainya, sebagaimana disampaikan oleh Ali Lubis, Ketua MUI dan tokoh masyarakat Kota Pematang Siantar:

"Tidak ada masalah jika seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Daerah memilih calon anggota yang beretnis dan agama yang sama dengannya, sepanjang tetap memperhatikan kinerja dan prestasi pegawai itu sendiri. Sesungguhnya terkait perekrutan pejabat di Pemerintah Kota Pematang Siantar telah menggunakan sistem karir dan prestasi kerja, namun sistem tersebut belum berjalan dengan baik karena tidak berpedoman pada aturan dan peraturan" (Wawancara, 27/09/2017).

Realitas terwujudnya kesetaraan dalam tubuh pemerintah eksekutif di Kota Pematang Siantar tidak lepas dari perjuangan masyarakat minoritas. Hal ini sesuai dengan definisi politik multikulturalisme Charles Taylor, yaitu perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, yakni pengakuan akan keberadaan berbagai kelompok dengan pandangan hidup yang berbeda-beda, dan kebijakan politik yang mampu memungkinkan kelompok-kelompok tersebut tumbuh dan berkembang, lepas dari keterbatasan serta keunikan identitas yang dimiliki masing-masing kelompok (*Wattimena, 2011: 18*).

Pada tatataraan praksis, antaramasyarakat mayoritas dan minoritas di Pematang Siantar memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam kegiatan-kegiatan politik. Meski keberadaan masyarakat minoritas di Kota Pematang Siantar baru terpenuhi haknya terbatas dalam 'hak polietnis' dan 'hak perwakilan khusus'. Terpenuhinya hak polietnis dapat disaksikan sebagaimana adanya kedudukan yang sama antara

masyarakat mayoritas dan minoritas di depan hukum, selain dapat hidup dengan aman dan nyaman dan terjaminnya kebebasan berkumpul bagi masyarakat minoritas. Sementara adanya beberapa jabatan yang diduduki oleh masyarakat minoritas, membuktikan bahwa masyarakat minoritas di Kota Pematang Siantar telah memperoleh hak perwakilan khusus, yaitu memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu pada pemerintahan eksekutif.

Keberhasilan dalam melakukan praktik politik multikultural sebagai modal kultur dan modal sosial merupakan kekhasan sekaligus yang membedakan antara wilayah Pematang Siantar dengan wilayah lain. Keanekaragaman yang ada di wilayah ini diterima oleh masyarakat dengan baik yang dibuktikan dengan terwujudnya kerukunan dan toleransi di antara masyarakat beda agama dan etnis. Keberhasilan multikultural dalam memerankan fungsinya sebagai perekat sosial (*social integrative factor*) dipengaruhi oleh suasana sosial yang berjalan, yang tidak lain karena kemampuan pemerintah setempat dalam mengendalikan berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terwujudnya integritas di Pematang Siantar akibat telah berjalannya sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem pertahanan keamanan secara kondusif sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera, tenang, dan damai tanpa pernah mengalami gesekan dalam bingkai keberagaman etnis dan agama.

SIMPULAN

Telah terbangunnya kesadaran kolektif terhadap keragaman realitasnya menjadikan kehidupan masyarakat Pematang Siantar yang multikultur dan plural dengan berabagai etnis, budaya, dan agama dapat hidup secara harmoni, terbebas dari segala bentuk konflik sosial dan agama. Meski demikian, dalam rangka mengantisipasi konsekuensi sosial akibat perubahan penduduk, masyarakat yang dimotori oleh para tokoh agama, masyarakat, adat, dan elite politik terus melestarikan dan mempertahankan harmonisasi kehidupan, dan pengelolaan konflik dengan melakukan pengembangan sikap kritis melalui gerakan multikulturalisme yang direproduksi secara sosial berdasar 'perspektif internal', di antaranya melakukan pengembangan sikap toleransi, pelestarian sistem kekerabatan dan tradisi, menolak primordialisme, dan menerapkan politik multikulturalisme yang mengkristal sebagai sebuah konsep strategi masyarakat Kota Pematang Siantar di dalam membumikan wawasan multikulturalisme. Berbagai potensi yang dikembangkan atas kemajemukan masyarakat di Kota Pematang Siantar dikemas dalam satu slogan falsafah hidup masyarakat Pematang Siantar: "*Sapangambei Manoktok Hitei*", yang artinya "bergotong-royong demi tujuan mulia". Artinya, penguatan persatuan lewat permisif ideal utopis dari kesatuan-kesatuan menjadi benteng kehidupan bersama dan sebaliknya, dengan bercerai berai maka tidak ada kekuatan untuk membangun sebuah monumen peradaban di wilayah Kota Pematang Siantar.

DAFTAR ACUAN

- Abdullah, Irwan. "Dari Bounded System ke Borderless Society: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini", *Antropologi Indonesia*, Vol. 60, hal.11-18, 1999.
- Akil, Mahmud. "Fenomena Etnisitas di Kalimantan Barat", dalam Paulus Florus et al., *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*, Jakarta: Grasindo, 1994.
- Appadurai, Arjun. "Global Ethnoscape: Notes and Queries for Transnational Anthropology", dalam R. G. Fox (ed.), *Recapturing Anthropology*, Santa Fee, NM: School of America Research Press, 1994.
- Berger, Peter & Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality*, New York: Penguin Books, 1979.
- _____. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- BPS Pematang Siantar. *Kota Pematang Siantar dalam Angka*, 2017.
- Cheater, Angela. *The Anthropology of Power*, London: Routledge, 1999.
- Daulay, Zainuddin, M. "Berayun di Atas Jembatan Adat, Penyelamat Benturan Antarumat: Relasi Anatarumat Beragama di Siantar, Sumut", dalam Haidlor dan Hidayatulloh, *Relasi Antar Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, hal. 119-148, 2016.
- Effendi, Djohan. *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: Interfidei, 2011.
- Eller, J. *From Culture to Ethnicity to Conflict*, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1999.
- Fetterman, David M. *Ethnography Step by Step*, California: SAGE Publications, 1989.
- Green, J.W. *Cultural Awareness in the Human Service*, Boston: Allyn and Bacon, 1995.
- Lubis, Fadhil Nur, A. Multikulturalisme Dalam Budaya, *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNIVISI*, Vol. II, No. 1, April, 2006.
- Kappus, Elke-Nicole. "Changing History: Ethnic Identity Management in Treste", dalam Cora Govers dan Hans Vermeulen (ed.), *The Politics of Ethnic Consciousness*, London: Mac Millan, 1999.
- Komisi Teologi PGI. *Meretas Jalan Menuju Perdamaian, Keadilan, dan Keutuhan Ciptaan*, Jakarta: PGI, 2012.
- Ridwan, Nur Khalik. *Islam Borjuis dan Islam Proletar: Konstruksi Baru Masyarakat Islam Nusantara*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Salam, Solichin. *Kudus Purbakala dalam Perjuangan Islam*, Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Sanjek, R. (ed.). *Fieldnotes: The Makings of Anthropology*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1990.
- Silitonga, Juwanda, Arfan. "Politik Multikulturalisme" (Studi Analisis Pada Struktur Pemerintahan Kota Pematangsiantar), *Skripsi*, Medan: USU Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016.

- Simanjuntak, Bungaran. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Smartana, Th. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Interfidei, 2005.
- Soros, George. *Open Society: Reforming Global Capitalism*, 2000.
- Starr, H. *The Understanding and Management Global Violence*, London: Mac Millan, 1999.
- Titaley, John, A. *Riligiuitas di Alinea Tiga, Pluralisme, Nasional, dan Transformasi Agama-Agama*, Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013.
- Wattimena, Reza A. A. Menuju Indonesia Bermakna: Analisis Tekstual-Empiris terhadap Pemikiran Charles Taylor tentang Politik Pengakuan dan Multikulturalisme, Serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia, *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 11, No.1, 2011.
- Yuwono, Dandung, B. Wayame: Gerakan Multikultural di Tengah Konflik Ambon, *Jurnal Harmoni*, Vol. VII, Nomor 27, Juli-September, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat, Kemenag RI, 2008.
- _____. Konstruksi Sosial Atas Warisan Budaya Sunan Kudus, dalam *Jurnal SMaRT*, Vol. 3 No. 01, Juni, hal. 104-117, 2017.